



STRATEGI OPERASI PERTAHANAN PERAIRAN SELATAN JAWA OLEH KOARMADA II GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN LAUT NUSANTARA

Bambang Subeno¹, D. Herly Dwiyanto², Agustinus Adi Santoso³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia ^{1 2 3}

subenobembenk@gmail.com, herlydwiyanto@gmail.com

Korespondensi penulis: subenobembenk@gmail.com

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has a large water area so that it has a high risk of defense and security threats. One of these water areas is the Java Sea waters which directly borders Australia so that it is very dangerous for Indonesia because it is a strategic route for the US fleet. The purpose of the study was to analyze the management and operational patterns of the Indonesian Navy as the implementation of the defense strategy of the southern Java waters in Cilacap and to analyze stakeholder cooperation in the defense operation system of the southern Java waters in Cilacap. The type of research is qualitative with descriptive data analysis techniques. The research was conducted at Bakamla RI, Koarmada RI, Koarmada II and the Cilacap Region. The subjects of the study were the parties in the research background used to provide information, namely people who were directly involved and understood the defense system of the southern Java waters by Koarmada II. Data collection techniques through interviews. The results of the study prove that the Indonesian Navy's operational management was only held by 1 element of the PKR type KRI, namely KRI AMY and the operational pattern through the waiting method. The existence of state patrol elements is found in the Indonesian Navy patrol fleet, Satpolair Polres Cilacap and PSDKP Cilacap Station. The Surveillance system is implemented through the use of a web-based surveillance system. While cooperation between stakeholders is only limited to SAR operations.

Keywords: Java Sea, Defense Strategy, Stakeholder Cooperation

Abstrak. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang besar sehingga memiliki risiko ancaman pertahanan dan keamanan yang besar. Salah satu wilayah perairan tersebut adalah perairan Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan negara Australia sehingga sangat membahayakan Indonesia karena menjadi rute strategis bagi armada AS. Tujuan penelitian adalah menganalisis manajemen dan pola operasi TNI AL sebagai pelaksanaan strategi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap dan menganalisis kerjasama stakeholder dalam sistem operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan teknik analisis data Deskriptif. Penelitian dilakukan pada Bakamla RI, Koarmada RI, Koarmada II dan Wilayah Cilacap. Subjek penelitian adalah pihak-pihak didalam latar belakang penelitian digunakan untuk memberi informasi, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan mengerti tentang sistem pertahanan perairan Selatan Jawa oleh Koarmada II. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian membuktikan Manajemen operasi TNI AL hanya digelar 1 unsur KRI jenis PKR yaitu KRI AMY serta Pola operasi melalui metode tunggu. Keberadaan unsur patroli negara terdapat pada armada patrol TNI AL, Satpolair Polres Cilacap dan Stasiun PSDKP Cilacap. Sistem Surveillance dilaksanakan melalui penggunaan sistem surveillance berbasis web. Sementara kerjasama antar stakeholder hanya terbatas pada operasi SAR.

Kata kunci: Laut Jawa, Strategi Pertahanan, Kerjasama Stakeholder

1. LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar seluas 1.904.569 km² serta garis pantai 54.716 km (Fatimah et al., 2021). Dengan predikat negara kepulauan, Indonesia mempunyai kandungan sumber daya alam (SDA) melimpah serta terletak di posisi silang dua benua (Asia



dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) sehingga Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis sehingga bernilai tinggi baik dalam aspek geostrategi maupun geopolitik dalam tatanan dunia, kondisi ini secara alamiah menjadikan Indonesia bernilai sangat strategis bagi negara-negara di dunia dengan segala kepentingan nasionalnya (national interest). Kandungan SDA dan posisi strategis Indonesia tersebut, menjadikan peluang sekaligus ancaman sistematis yang mengancam keamanan negara (Fatimah et al., 2021). Mengacu pada kondisi tersebut, maka pertahanan dan keamanan haruslah menjadi prioritas tertinggi bagi Indonesia, pertahanan yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen bangsa yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia dalam bentuk strategi pertahanan nusantara.

Pertahanan nusantara merupakan strategi pertahanan militer yang menjadi pertahanan, penyeimbang serta penguat kekuatan pertahanan. Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1290/XI/2023 tanggal 10 November 2023 disebutkan bahwa Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) ialah strategi pertahanan dengan sinergi strategi operasi kematraan dari Strategi Pertahanan Pulau Besar (TNI AD), Strategi Pertahanan Laut (TNI AL) serta Strategi Pertahanan Udara (TNI AU) secara komprehensif dan holistik bersama komponen bangsa lainnya dalam harmonisasi peperangan semesta.

Lautan khususnya pada perbatasan berpotensi besar selaku sumber konflik sehingga diperlukan pembangunan kapabilitas serta kekuatan TNI AL. Strategi Pertahanan Berlapis diarahkan sebagai penghacuran ancaman eskternal melalui kekuatan gabungan laut serta udara. Strategi ini diimplementasikan berbentuk operasi tempur laut bersifat pertahanan ke depan dengan memperhatikan konsep pergeseran medan juang;

Perairan selatan Pulau Jawa merupakan salah satu perairan dengan sumber daya melimpah dimana wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi titik masuk atau jalur transit bagi kegiatan maritim yang berpotensi mengancam keamanan nasional, kondisi ini akan semakin kompleks dengan perkembangan geopolitik kawasan yang salah satunya dengan terbentuknya pakta pertahanan AUKUS merupakan pakta pertahanan antara AS, Inggris dan Australia sehingga semakin menjadikan perairan Selatan Jawa memiliki kerentanan yang cukup tinggi (Haerulloh et al., 2024)

Mencermati peristiwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah perairan Indonesia seperti laut Selatan Jawa berbatasan langsung dengan Australia menjadi rute strategis bagi armada AS karena sebagai rute atau jalur yang menghubungkan pangkalan militer AS di Australia dengan sejumlah pangkalan AS pada negara Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), Asia Tenggara di (Singapura, Thailand dan Filipina) yang merupakan bagian dari island chain strategy AS. Ketidadaan kehadiran unsur TNI AL dari jajaran Koarmada II di Perairan Selatan Jawa dan belum optimalnya strategi operasi pertahanan laut yang mampu melakukan pemantauan dan pelacakan situasi perairan Indonesia secara terus menerus menjadikan ketidakmampuan TNI khususnya TNI AL dalam memantau pergerakan USS Ronald Reagan diidentifikasi tidak sepenuhnya menyalakan AIS sepanjang perjalanan melintasi perairan Indonesia sehingga tidak dapat dipastikan kegiatan apa saja yang dilakukan



USS Ronald Reagan bersama kekuatan gugus tempurnya selama melintasi perairan Indonesia, hal ini semakin riskan karena tidak adanya kehadiran unsur TNI AL dhi Koarmada II di perairan Selatan Jawa.

Berdasarkan pada uraian kondisi yang diharapkan dan kondisi faktual saat ini, menjadikan adanya gap dalam strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari sisi Selatan Pulau Jawa. Maka peneliti akan mengangkat penelitian berjudul, “Strategi Operasi Pertahanan Perairan Selatan Jawa Oleh Koarmada II Guna Mendukung Sistem Pertahanan Nusantara”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertahanan. Pertahanan ialah ilmu tentang upaya pengelolaan sumber daya serta kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman militer serta non militer (Supriyanto, 2014), pendapat lain tentang pertahanan dalam konteks ilmu yaitu pendapat Syarifudin (2015) yang menyebutkan bahwa pertahanan merupakan suatu objek mencerminkan perilaku negara dalam rangka menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan, hal ini dapat dijelaskan bahwa pertahanan dalam konteks ilmu membahas tentang interdisiplin ilmu yang meliputi strategi pertahanan, manajemen, ekonomi pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan. Dengan mengacu hal tersebut, Syarifudin (2015) menyebutkan bahwa ilmu pertahanan berada di posisi grand strategy.

Teori Strategi. Strategi diperoleh dari kata bahasa Yunani “Strategua” atau seni panglima pada peperangan. Menurut Sukristono (1995), strategi ialah pola rencana dengan integrasi tujuan, kebijakan serta aksi utama pada hubungan kohesif. Menurut Husein Umar (2001) menyatakan strategi selaku proses penentuan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi yang baik dapat organisasi melakukan pemberdayaan sumber daya. Sementara menurut Umar (2001) strategi ialah tindakan bersifat incremenial serta berkelanjutan sesuai pandangan masa depan.

Teori Sea Power. Menurut Marsetio (2015) peran laut penting selaku aspek kekuatan bangsa, dimana ”Siapa yang menguasai lautan, akan menguasai dunia”. Dalam pembangunan Sea Power membutuhkan beberapa persyaratan seperti posisi serta kondisi geografi, luas wilayah, jumlah karakter penduduk serta karakter pemerintah. Marsetio (2015) menyataka Kekuatan Laut selaku “All that tends to make a people great upon the sea or by sea”. Sea Power identik pada kekuatan maritim. Apabila kekuatan diberdayakan dapat mengeskalasi Keamanan Negara. menurut A.T. Mahan diperlukan 6 elemen pokok modal utama, yaitu (Marsetio, 2015): Letak Geografi, Bangun Muka Bumi, Luas Wilayah, Karakter Masyarakat, Jumlah Penduduk, Karakter Pemerintahan

Teori Kelautan. Menurut Godam (2009) laut ialah sekumpulan air asin berjumlah banyak yang membagi daratan atas benua selaku muara air dari daratan. Menurut Hartono (2007) laut dibedakan dalam beberapa jenis antara lain: 1) Berdasarkan proses terjadinya



terdapat laut transgresi yang timbul akibat tansfformasi permukaan laut dengan positif, 2) Sesuai letaknya terdapat laut tepi terletak pada tepi benua, 3) Berdasarkan kedalamannya.

Teori Deteksi. Tita (2017) menyebutkan bahwa deteksi merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan pemeriksaan melalui cara tertentu. Tujuan deteksi ialah menyelesaikan permasalahan melalui berbagai cara untuk menciptakan solusi. Dalam operasi pertahanan laut kemampuan deteksi sangat dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh objek yang berpotensi mengganggu atau mengakibatkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara di laut. Dalam proses deteksi terdapat Signal Detection Theory yang merupakan kerangka kerja umum yang merefleksikan keputusan. Teori menganalisis hubungan stimulus fisik serta efek subjektif (Wickens, 2002).

Teori Indirect Approach. Teori indirect Approach dikemukakan oleh Sir Basil Liddell Hart memiliki kontribusi pada pemikiran strategis seperti ide pendekatan tidak langsung/Indirect approach yang merupakan ide sentralnya mengenai kesuksesan dalam strategi mengadu kekuatan melawan kelemahan, mengeksploitasi manuver untuk mengambil garis wilayah pertahanan yang paling sedikit perlawanannya dan wilayah yang paling tidak ditebak oleh musuh.

Teori Omnibus Law. Raharjo (1981) menjelaskan bahwa omnibus diperoleh dari bahasa latin yang artinya semuanya, maka bila digabungkan dengan law (hukum) berarti hukum untuk semua. Bryan A Gamer (2004) menyebut bahwa kata lain omnibus law adalah omnibus bill yang dapat diartikan sebagai suatu perubahan perundangan. Lebih lanjut Asshiddiqie (2020) menyebutkan terdapat tiga keadaan pada praktik omnibus law, Pertama ketika perundangan diubah, kedua saat perundangan diubah berkaitan secara tidak langsung, ketiga saat perundangan diubah tidak mempunyai keterkaitan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana kajian tanpa memakai angka statistik tetapi dengan pemaparan deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala. Penelitian dilaksanakan pada Bakamla RI, Koarmada RI, Koarmada II dan Wilayah Cilacap. Penelitian berjalan dari bulan Maret hingga September 2024 sesuai jadwal kalender pendidikan Dikreg Sesko TNI Angkatan LII TA. 2024. Subjek penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan mengerti tentang sistem pertahanan perairan Selatan Jawa oleh Koarmada II. teknik pengumpulan data penelitian ini akan melakukan wawancara, Observasi, dan dokumentasi.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Manajemen dan pola operasi TNI AL sebagai pelaksanaan strategi operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap

Perairan di selatan Pulau Jawa merupakan wilayah perairan yang strategis karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan negara Australia. Wilayah ibukota Jakarta yang saat ini berada di Pulau Jawa bisa dijadikan sebagai centre of gravity (COG) bagi negara musuh terutama jika berhadapan dengan negara Australia. Dalam membahas manajemen operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa berdasarkan penjelasan ahli dari Asops Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo (2024) menyatakan bahwa gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa masih terbatas, sehingga manajemen operasi yang dilakukan TNI AL hanya menggelar satu unsur KRI jenis PKR yaitu KRI AMY, adapun untuk mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan dan keamanan di perairan Selatan Pulau Jawa, TNI AL mengoptimalkan peran intelijen dan teritorial.

Kemudian Penjelasan Asops Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, M.Tr.Hanla (2024) menyatakan bahwa gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa masih terbatas, dimana dari Koarmada II yang merupakan Kotama yang bertanggungjawab dalam gelar operasi TNI hanya menggelar 2 operasi di Perairan Selatan Jawa dan hanya mampu mengerahkan 1 unsur KIR jenis PKR kelas AMY.

Penjelasan Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Robby Edevaldo, S.AP., M.Tr.Opsla (2024) menyatakan bahwa Lanal Cilacap selaku Satkowil TNI AL di wilayah Selatan Jawa memiliki tugas operasi keamanan laut terbatas, menerapkan manajemen operasi melalui gelar operasi secara periodik 4 Triwulan dalam satu tahun, namun kemampuan unsur sarana patroli yang dimiliki Lanal Cilacap sangat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau wilayah perairan Selatan Jawa dari Perairan Cilacap hingga Perairan Purworejo.

Pola gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa menurut penjelasan ahli dari Asops Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo (2024) yaitu pola gelar operasi TNI AL di perairan dengan metode tunggu di pangkalan terdekat, sehingga KRI akan bergerak berdasarkan data dan informasi intelijen, dengan metode ini diharapkan gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa lebih efektif dan efisien hal ini untuk mensiasati terbatasnya dukungan BBM dan terbatasnya unsur KRI yang dapat digelar di perairan Selatan Jawa.

Kemudian, penjelasan Asops Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, M.Tr.Hanla (2024) menyatakan bahwa pola gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa menggunakan metode tunggu di pangkalan terdekat, sehingga KRI akan bergerak berdasarkan data dan informasi intelijen, metode ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa, sebagai respons terhadap keterbatasan dukungan BBM dan jumlah KRI yang dapat dikerahkan di wilayah tersebut.

Penjelasan Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Robby Edevaldo, S.AP., M.Tr.Opsla (2024) menyatakan bahwa Lanal Cilacap selaku Satkowil TNI AL di wilayah Selatan Jawa,



pola operasi dilakukan dengan menggunakan metode tunggu, Dimana unsur patroli Lanal akan bergerak berdasarkan data dan informasi intelijen, selain itu Posal dibawah jajaran Lanal Cilacap juga diintensifkan perannya sebagai mata dan telinga dalam mendukung gelar Opskamlatas Lanal Cilacap dalam menjaga perairan Selatan Jawa.

4.1.2 Keberadaan unsur patroli negara, sistem surveillance dan kerjasama stakeholder dalam sistem operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap.

Dalam pelaksanaan strategi operasi pertahanan perairan Selatan Jawa dibutuhkan suatu koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder, sehingga perlu pembahasan mengenai keberadaan unsur patroli yang dimiliki masing-masing stakeholder termasuk peralatan surveillance dan pola kerjasama yang dilakukan. Dalam membahas keberadaan unsur patroli negara di perairan Selatan Jawa berdasarkan penjelasan ahli dari Asops Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo (2024) menyatakan bahwa keberadaan unsur TNI AL yang mampu dikerahkan di Samudera Hindia Perairan Selatan Jawa KRI jenis PKR kelas AMY. Mencermati hal tersebut, maka keberadaan unsur patroli TNI AL di perairan Selatan Jawa masih sangat terbatas, mengingat terbatasnya unsur patroli tersebut sehingga terjadi blank space ketiadaan unsur kapal patroli TNI AL di Perairan Selatan Jawa.

Kemudian, penjelasan Asops Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, M.Tr.Hanla (2024) menyatakan bahwa keberadaan unsur TNI AL yang mampu dikerahkan di Samudera Hindia Perairan Selatan Jawa KRI jenis PKR kelas AMY. Kondisi ini tentunya menjadikan minimnya kehadiran unsur patroli TNI AL di perairan Selatan Jawa.

Penjelasan Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Robby Edevaldo, S.AP., M.Tr.Opsla (2024) menyatakan bahwa keberadaan unsur patrol Lanal Cilacap sangat terbatas karena hanya memiliki 1 KAL Serayu (kondisi teknis 70%) dan 1 Patkamla Rigid Inflatable Boat (RIBB), kondisi ini tentunya menjadikan Lanal Cilacap tidak mampu untuk melaksanakan patroli Opskamlatas diseluruh wilayah kerja Lanal Cilacap yang meliputi perairan Cilacap, perairan Kebumen, hingga perairan Purworejo.

Penjelasan Dirops Bakamla RI (2024) menyatakan bahwa Bakamla RI selaku institusi penjaga keamanan laut baru memiliki 10 kapal patrol kelas 48 M – 110 M dan tidak memiliki pangkalan di Selatan Pulau Jawa, kondisi ini menjadikan ketiadaan unsur patroli Bakamla RI yang melaksanakan patroli keamanan laut di perairan Selatan Jawa.

Penjelasan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H. (2024) menyatakan bahwa Satpolair Polresta Cilacap memiliki 3 kapal jenis C-3 dengan spesifikasi Panjang 6 Meter dan Lebar 3 Meter dengan kecepatan 20 Knot, kondisi ini tentunya sulit dan tidak mampu untuk melakukan patrol hingga perairan Selatan Jawa karena kondisi medan perairan Selatan Jawa yang ekstrem.

Penjelasan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Erik Sostenes, S.St.Pi., M.Si (2024) menyatakan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap memiliki 3 armada speedboat pengawasan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 84 Kapal Ikan Indonesia (KII) pada tahun 2022, 44 KII



pada tahun 2023. Operasi yang dilakukan adalah operasi pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ditujukan terhadap kapal-kapal nelayan penangkap ikan.

Selain itu, berdasarkan penjelasan ahli dari Asops Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo (2024) menyatakan bahwa sistem surveillance yang digunakan TNI AL dalam pengawasan situasi maritim perairan Selatan Jawa megandalkan aplikasi berbasis web serta mengandalkan sharing informasi dari Pusinfomar TNI.

Penjelasan Asops Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, M.Tr.Hanla (2024) menyatakan bahwa Koarmada II dalam melakukan pengawasan situasi perairan Selatan Jawa mengandalkan Sea Vision dan informasi dari Staf Intelijen

Penjelasan Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Robby Edevaldo, S.AP., M.Tr.Opsla (2024) menyatakan bahwa radar Pantai yang merupakan sistem surveillance Lanal Cilacap dalam kondisi rusak, kondisi ini menjadikan informasi intelijen menjadi tumpuan utama dalam monitoring wilayah perairan Selatan Jawa.

Penjelasan Dirops Bakamla RI (2024) menyatakan bahwa Bakamla RI memilki IMIC sebagai sistem surveillance berbasis web untuk melakukan pengawasan situasi maritim perairan Selatan Jawa yang dapat memantau situasi perairan secara realtime.

Penjelasan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H. (2024) menyatakan bahwa Satpolair Polresta Cilacap mengandalkan sistem surveillance berbasis web dalam melakukan monitoring situasi perairan Cilacap.

Penjelasan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Erik Sostenes, S.St.Pi., M.Si (2024) menyatakan bahwa Stasiun PSDKP menggunakan sistem iberbasis web dalam melakukan monitoring kapal-kapal ikan di wilayah perairan Cilacap.

Penjelasan ahli dari Asops Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo (2024) menyatakan bahwa kerjasama antar stakeholder dalam melakukan operasi bersama di perairan Selatan Jawa belum pernah dilaksanakan.

Penjelasan Asops Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, M.Tr.Hanla (2024) menyatakan bahwa bahwa kerjasama antar instansi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Selatan Jawa baru ditahap koordinasi dan sharing informasi, adapun operasi bersama terbatas pada operasi SAR.

Penjelasan Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Robby Edevaldo, S.AP., M.Tr.Opsla (2024) menyatakan bahwa kerjasama antar instansi atau stakeholder di Cilacap terbatas pada operasi SAR. Adapun operasi bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Selatan Jawa belum pernah dilaksanakan, baru ditahap koordinasi dan sharing informasi.

Penjelasan Dirops Bakamla RI (2024) menyatakan bahwa aspek koordinasi dan kerjasama antar stakeholder sudah terjalin pada tahap pertukaran informasi dalam forum daily brief yang diselenggarakan oleh Bakamla yang melibatkan instansi terkait yang memiliki armada seperti TNI AL, Polri, KKP, Kemenkeu, dan Kemenhub sebagai narahubung yang standby di Puskodal



Bakamla RI, serta instansi teknis lainnya seperti BIN, BRIN, BAIS, Basarnas, BNN, BMKG, KLHK, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenlu, Kemen ESDM, dan lain-lain.

Penjelasan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H. (2024) menyatakan bahwa aspek kerjasama dan koordinasi antar stakeholder maritim di Cilacap masih terbatas pada patroli bersama dalam rangka SAR dan bantuan kemanusiaan, Adapun patroli bersama dalam rangka penindakan dan pencegahan terhadap gangguan dan ancaman keamanan laut belum terjalin.

Penjelasan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Erik Sostenes, S.St.Pi., M.Si (2024) menyatakan bahwa aspek kerjasama dan koordinasi antar stakeholder maritim di Cilacap sudah terjalin dalam koordinasi dan sharing informasi, adapun saat ini patroli bersama dalam rangka penindakan dan pencegahan IUU Fishing sudah mulai terjalin dengan Lanal Cilacap.

4.2. Diskusi

4.1.3 Manajemen dan pola operasi TNI AL sebagai pelaksanaan strategi operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap.

Indonesia sebagai negara yang berada pada jalur silang dunia yang memiliki potensi kandungan sumber daya alam yang tinggi, menjadikannya sebagai suatu peluang dan tantangan demi mencapai tujuan nasional. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi adalah perairan Selatan Pulau Jawa menjadikannya sebagai salah satu perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi maritim yang besar dimana wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi entry point atau jalur transit bagi kegiatan maritim internasional yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Menyikapi hal kondisi tersebut, maka perlu strategi pertahanan yang kuat di Perairan Selatan Jawa, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang dalam pasal 1 disebutkan bahwa pertahanan negara bahwa merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya berupa lautan, memiliki kepentingan yang tinggi di sektor kelautan. Dalam teori Sea Power, AT Mahan menekankan bahwa "kekuatan laut" adalah kunci untuk supremasi global. Ia berpendapat bahwa negara yang menguasai laut akan memiliki pengaruh besar dalam urusan internasional, baik dalam perang maupun perdamaian. Dengan mengacu pada teori tersebut, dalam mewujudkan pertahanan negara di laut, maka diperlukan rumusan strategi yang tepat. Strategi merupakan ketrampilan/seni mendistribusikan dan menggunakan (ways) sarana militer (means) guna mewujudkan tujuan akhir kebijakan (ends) (Liddell-Hart, 1967).

Kondisi geografis Perairan Selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki medan perairan yang ekstrem, menuntut penentuan straregi

yang tepat dan efektif bagi TNI AL dalam menerapkan manajemen operasi, dari hasil pendalaman diperoleh data primer bahwa manajemen operasi yang dilakukan TNI AL saat ini hanya menyediakan satu unsur KRI jenis PKR yaitu KRI AMY dalam mengamankan perairan Selatan Jawa.

Manajemen operasi dan pola gelar operasi TNI AL di perairan dengan metode tunggu di pangkalan terdekat, memungkinkan KRI akan bergerak berdasarkan data dan informasi intelijen, dengan metode ini diharapkan gelar operasi TNI AL di perairan Selatan Jawa lebih efektif dan efisien hal ini untuk mensiasati terbatasnya dukungan BBM dan terbatasnya unsur KRI yang dapat digelar di perairan Selatan Jawa. Adapun penerapan metode tunggu dalam manajemen operasi dan pola gelar operasi di Perairan Selatan Jawa dapat dilakukan dengan menginsensifkan peran intelijen dalam memberikan data dan informasi yang akurat guna efektifitas dan efisiensi gelar operasi.

Tabel 1. Pandangan Teori dan Temuan Penelitian terkait Manajemen dan Pola Operasi TNI AL Dalam Strategi Operasi Pertahanan Perairan Selatan Jawa di Cilacap

No	Teori	Temuan Penelitian
1.	Pertahanan Negara menurut KJ Holsti yang dikutip Indrawan (2015): pertahanan merupakan kepentingan nasional yang dianggap sebagai nilai inti yang vital (core value) yang berkaitan dengan eksistensi keberadaan dari suatu negara	TNI AL sebagai bagian integral dari TNI menyelenggarakan pertahanan negara di laut dengan menggelar operasi Trisila Tahap III
2.	Teori kelautan Yulia Masfiani dkk (2016): terdapat zona kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah suatu negara	Pemerintah Indonesia menjadikan teori kelautan sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan pertahanan laut yang mencakup strategi penguasaan laut, pengendalian laut, dan proyeksi kekuatan laut untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional
3.	Teori Sea Power, AT Mahan menekankan bahwa "kekuatan laut" adalah kunci untuk supremasi global, negara yang menguasai laut akan memiliki pengaruh besar dalam urusan internasional, baik dalam perang maupun perdamaian.	Kebijakan poros maritim dunia (PMD) pemerintah Indonesia saat ini merupakan implementasi sea power yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Indonesia yang berada pada posisi silang dunia.
4.	Strategi menurut Liddell Hart, (1967): Merupakan ketrampilan/seni mendistribusikan dan menggunakan (ways) sarana militer (means) guna	- Means yang disiapkan TNI AL hanya 1 unsur KRI AMY jenis PKR - Ways atau cara yang dilakukan dengan pola operasi tunggu dengan menempatkan unsur TNI AL pada pangkalan terdekat dengan pergerakan unsur berdasarkan data dan informasi intelijen



No	Teori	Temuan Penelitian
	mewujudkan tujuan akhir kebijakan (ends)	- Ends atau tujuan akhir dalam strategi ini adalah terwujudnya pertahanan dan keamanan laut perairan Selatan Jawa.

4.1.4 Keberadaan unsur patroli negara, sistem surveillance dan kerjasama stakeholder dalam sistem operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap.

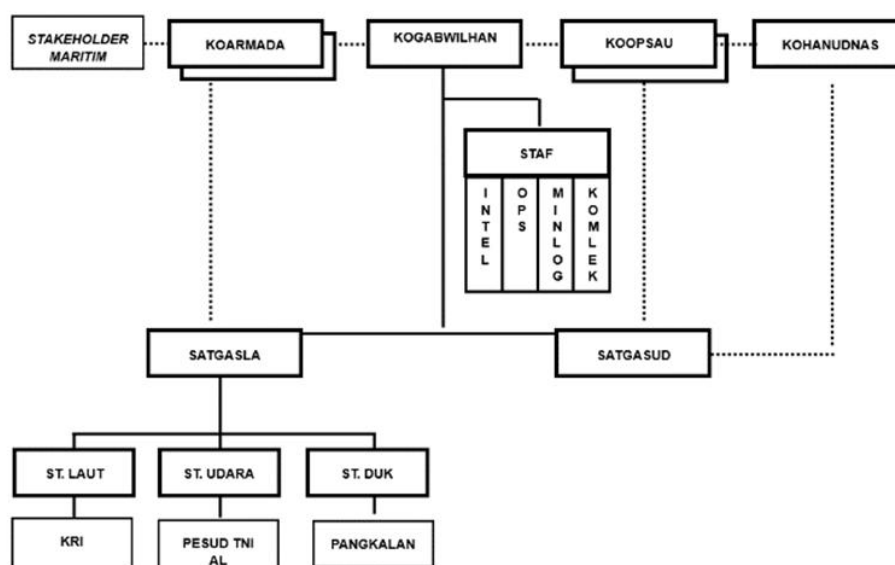
Dalam upaya pertahanan di laut, TNI AL bertindak sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan seperti para nelayan dan stakeholder maritim serta komponen pendukung yang terdiri dari institusi keamanan laut yang meliputi Polisi Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dll. Mengacu hal tersebut, implementasi sistem pertahanan semesta di Perairan Selatan Jawa khususnya di Perairan Cilacap meliputi TNI AL dhi Koarmada II dan Lanal Cilacap, Bakamla, Satpolair Polresta Cilacap, Stasiun PSDKP Cilacap. Upaya pelibatan seluruh stakeholder maritim dalam pertahanan perairan Selatan Jawa sebagai implementasi Sistem Pertahanan Semesta, namun demikian implementasi pelibatan seluruh stakeholder tersebut belum berjalan optimal, hal ini didasarkan pada data primer yang diperoleh bahwa selama ini belum pernah dilaksanakan operasi bersama dalam men jaga keamanan dan kedaulatan perairan Selatan Jawa, hal ini didasarkan pada terbatasnya ketersediaan unsur sarana patroli negara yang berada di perairan Selatan Jawa, sebagaimana diketahui TNI AL dalam hal ini Koarmada II hanya menggelar 1 unsur KRI AMY-351 di perairan Selatan Jawa, adapun Lanal Cilacap hanya memiliki 1 KAL dan 1 Patkamla RIBB yang memiliki kemampuan terbatas hanya pada alur perairan Cilacap saja, sedangkan Bakamla tidak memiliki unsur dan pangkalan di wilayah Selatan Jawa sementara KKP hanya memiliki 3 speed yang hanya bisa beroperasi di alur perairan Cilacap, adapun Satpolair Polresta Cilacap hanya memiliki 3 kapal patroli yang juga memiliki kemampuan terbatas. Kondisi ini menjadikan belum optimalnya kerjasama stakeholder dalam menjaga pertahanan perairan Selatan Jawa sekaligus mengimplementasikan sistem pertahanan semesta.

Merujuk pada teori Sea Power yang dicetuskan AT Mahan yang menekankan bahwa negara yang menguasai laut akan memiliki pengaruh besar dalam urusan internasional, selanjutnya A.T. Mahan menyebutkan 6 (enam) elemen pokok dalam mengembangkan Sea Power, yaitu (Marsetio, 2015), dimana prasyarat ini dimiliki oleh Indonesia: Letak Geografi (Geographical Position), Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dunia menjadi peluang dalam membangun sea power; Bangun Muka Bumi (Physical Conformation), letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara pantai yang terletak pada posisi silang dunia menjadikannya banyaknya pelabuhan alam akses lalu lintas pelayaran dunia, yang menjadi peluang dalam membangun sea power; Luas Wilayah (Extent of Territory), konstelasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, jika dipelajari dengan seksama, tiap wilayah punya titik-titik yang penting yang menentukan kekuatan ataupun kelemahannya secara militer.

Mencemati terbatasnya unsur sarana patroli yang dihadapkan pada luasnya wilayah perairan dan ekstremnya medan perairan Selatan Jawa, maka diperlukan suatu strategi pengawasan yang dapat mendukung efektifitas dan efisiensi gelar sarana patroli melalui penggunaan teknologi surveillance untuk melakukan deteksi dan pengawasan lalu lintas di perairan Selatan Jawa. Penggunaan peralatan surveillance dalam mendukung operasi pertahanan perairan Selatan Jawa sejalan dengan teori indirect approach yang dikemukakan oleh Sir Basil Liddell Hart yaitu penggunaan strategi yang mengadu kekuatan melawan kelemahan, mengeksploitasi manuver untuk mengambil garis wilayah pertahanan yang paling sedikit perlawanannya dan wilayah yang paling tidak ditebak oleh musuh.

Implementasi teori indirect approach dalam pertahanan perairan selatan Jawa melibatkan penggunaan strategi-strategi yang tidak langsung dan lebih bersifat jangka panjang untuk mencapai tujuan pertahanan yang diinginkan tanpa harus menimbulkan eskalasi militer yang langsung dan terbuka. Ini bisa diterapkan dengan berbagai cara, yang mencakup penguatan kapabilitas, peningkatan kesiapan, serta pengembangan kerja sama dan teknologi. Pemasangan jaringan sensor dan radar pasif di sepanjang perairan selatan Jawa memungkinkan deteksi kapal dan pesawat musuh tanpa memancarkan sinyal aktif yang dapat terdeteksi, hal ini diimplemmentasikan TNI AL dengan pemasangan radar pasif di Pantai Congot Cilacap, namun pada perkembangannya radar tersebut saat ini dalam kondisi rusak.

Dengan omnibus law bidang keamanan laut, maka membangun sinergitas dalam penyelenggaraan keamanan laut juga akan semakin menguat yang turut serta didukung pelibatan kekuatan udara dalam hal ini penguatan radar udara TNI, UAV maupun pesawat udara TNI AU untuk melaksanakan dukungan patroli udara di wilayah perairan Selatan Jawa. Dalam konsep ini dapat dikombinasikan dengan unsur laut sehingga mampu terwujud kekuatan sinergis seluruh instrumen nasional dalam menghadapi segala potensi ancaman yang ada di laut, konsep ini dapat dilihat dalam gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 2. Konsep Organisasi Pengamanan Laut Terpadu

Dalam gambar tersebut, dapat dijabarkan bahwa stakeholder maritim dijadikan satu entitas komponen pendukung pertahanan di laut, hal ini untuk memudahkan dalam koordinasi dan kerjasama di lapangan, selanjutnya Koarmada membawahi Satgas Laut yang terdiri dari Satuan Tugas Laut, Satuan Tugas Udara dan Satuan Tugas Dukungan yang diemban oleh Pangkalan di Selatan Jawa dalam hal ini Lanal Cilacap. Selanjutnya Kogabwilhan selaku koordinator yang mengelaborasi Koarmada yang membawahi Satgas Laut dan Koopsau yang membawahi Satgas Udara serta Kohanudnas yang mengemban fungsi pertahanan udara. Dengan mengimplementasi hal tersebut, maka keterbatasan unsur sarana patroli dan keterbatasan kemampuan surveillance yang dimiliki oleh stakeholder maritim kita dapat saling tertutupi dan mampu dielaborasi menjadi kekuatan laut (*sea power*) yang kuat dalam pertahanan perairan Selatan Jawa dalam rangka mendukung pertahanan nusantara.

Tabel 2. Pandangan Teori dan Temuan Penelitian terkait Keberadaan unsur patroli negara, sistem surveillance dan kerjasama stakeholder dalam sistem operasi pertahanan perairan selatan Jawa di Cilacap

No	Teori	Temuan Penelitian
1.	Pertahanan Negara menurut Syarifudin Tipe (2015): Pertahanan merupakan suatu objek mencerminkan perilaku negara dalam rangka menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan	- TNI AL sebagai komponen utama - Bakamla, Satpolair Polresta CLP, Stasiun PSDKP sebagai komponen pendukung pertahanan di laut - TNI AL hanya menggelar 1 KRI AMY-351 di Perairan Selatan Jawa - Bakamla tidak menggelar unsur patroli - Satpolair Polresta CLP menggelar 3 kapal berkemampuan terbatas - Stasiun PSDKP hanya memiliki 3 Speed Boat - Unsur kapal negara di Perairan Selatan Jawa sangat terbatas, hanya kapal TNI AL jenis AMY Class yang mampu beroperasi di Perairan Selatan Jawa
2.	Teori kelautan Yulia Masfiani dkk (2016): terdapat zona kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah suatu negara	- Pemerintah menugaskan beberapa instansi untuk menjaga keamanan laut nasional, terdapat 7 (tujuh) lembaga/ kementerian yang sudah memiliki armada/kapal sebagai alat penegakan hukum di laut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni TNI AL, Polri/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan/Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan/Ditjen Bea dan Cukai serta Bakamla - 7 (tujuh) lembaga/kementerian lainnya tidak memiliki armada/kapal yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan,

No	Teori	Temuan Penelitian
		Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional dan pemerintah daerah
3.	Teori <i>Sea Power</i> , AT Mahan menyebutkan 6 (enam) elemen pokok dalam mengembangkan <i>Sea Power</i> , yaitu (Marsetio, 2015): Letak Geografi (<i>Geographical Position</i>); Bangun Muka Bumi (<i>Physical Conformation</i>); Luas Wilayah (<i>Extent of Territory</i>); karakter Masyarakat (<i>Character of The People</i>); jumlah Penduduk (<i>Number of Population</i>); karakter pemerintahan (<i>Character of Government</i>).	- 6 (enam) elemen pokok dalam mengembangkan <i>Sea Power</i> - Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dunia menjadi peluang dalam membangun <i>sea power</i>; letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara pantai yang terletak pada posisi silang dunia menjadikannya banyaknya pelabuhan alam akses lalu lintas pelayaran dunia, yang menjadi peluang dalam membangun <i>sea power</i> - Konstelasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, pemanfaatan pulau yang dimiliki sebagai pertahanan pulau besar maka akan dapat mendukung kekuatan laut - Karakter Masyarakat (<i>Character of The People</i>) Indonesia yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap tanah airnya, dan memiliki kebanggaan terhadap kebesaran sejarah bangsanya, merupakan kekuatan yang dapat memacunya menjadi negara maju dan jaya - Jumlah Penduduk (<i>Number of Population</i>), penduduk Indonesia yang merupakan salah satu terbesar di dunia, menjadikannya tenaga yang cukup untuk dijadikan tentara maupun komponen cadangan matra laut; - Karakter pemerintahan (<i>Character of Government</i>), kebijakan poros maritim dunia menjadikan peluang bagi Indonesia dalam mewujudkan kekuatan laut (<i>sea power</i>).
4.	Strategi menurut Liddell Hart, (1967): Merupakan ketrampilan/seni mendistribusikan dan menggunakan (<i>ways</i>) sarana militer (<i>means</i>) guna mewujudkan tujuan akhir kebijakan (<i>ends</i>)	- <i>Means</i> yang disiapkan unsur kapal patroli negara dan TNI AL - <i>Ways</i> atau cara yang dilakukan dengan operasi bersama. - <i>Ends</i> atau tujuan akhir dalam strategi ini adalah terwujudnya pertahanan dan keamanan laut perairan Selatan Jawa.
5.	Teori deteksi oleh Tita (2017): Merupakan sebuah	- TNI AL mengandalkan teknologi <i>surveillance</i> berbasis web

No	Teori	Temuan Penelitian
	proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan teknik tertentu	- Stasiun PSDKP dan Satpolair Polresta Cilacap mengandalkan teknologi <i>surveillance</i> berbasis web - Bakamla memiliki sistem <i>surveillance Maritime Information Centre</i> (MIC), namun hasil pengawasan anomali belum tersosialisasikan ke instansi lain - Secara keseluruhan kemampuan deteksi maupun <i>surveillance</i> seluruh stakeholder dalam pengawasan situasi perairan Selatan Jawa masih terbatas dan belum terintegrasi
6.	Teori <i>Indirect Approach</i> S.B. Liddle Hart: Penggunaan strategi yang mengadu kekuatan melawan kelemahan, mengeksploitasi manuver untuk mengambil garis wilayah pertahanan yang paling sedikit perlawanannya dan wilayah yang paling tidak ditebak oleh musuh	- Penguatan peralatan <i>surveillance</i> sebagai implementasi <i>Indirect Approach</i>. - Pemasangan jaringan sensor dan radar pasif di sepanjang perairan selatan Jawa memungkinkan deteksi kapal dan pesawat musuh tanpa memancarkan sinyal aktif yang dapat terdeteksi, Keberadaan radar pasif TNI AL di Pantai Congot Cilacap sebagai implementasi <i>indirect approach</i>, namun pada perkembangannya radar tersebut saat ini dalam kondisi rusak
7.	Teori Omnibus Law Bryan A Gamer (2004): Sebagai suatu undang-undang yang dapat mengubah beberapa undang-undang sekaligus.	- Tata perundangan nasional yang berlaku saat ini terdapat 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan. - 14 (empat belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut - Model keamanan laut Indonesia <i>multy agency single task</i>

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan data yang didapatkan dari berbagai narasumber dan data penelitian, dapat digambarkan kesimpulan tentang Strategi Operasi Pertahanan Perairan Selatan Jawa Oleh Koarmada II Guna Mendukung Sistem Pertahanan Nusantara yang dilaksanakan melalui manajemen dan pola operasi mandiri TNI AL serta melalui strategi kerjasama stakeholder. Manajemen dan pola operasi mandiri TNI AL sebagai pelaksanaan strategi operasi pertahanan perairan Selatan Jawa di Cilacap masih belum mencapai hasil maksimal yang dihadapkan pada kendala kondisi terbatasnya unsur patroli TNI AL dimana hanya menggelar 1 unsur KRI AMY Class yang dianggap mampu beroperasi di perairan Selatan Jawa yang memiliki medan perairan yang ekstrem, adapun unsur TNI AL dari Lanal CLP berupa 1 KAL dan 1 Patkamla RIBB dinilai memiliki kemampuan



terbatas yang hanya dapat beroperasi pada alur pelayaran Cilacap dan tidak mampu beroperasi pada perairan Selatan Jawa. Mensiasaati hal tersebut, TNI AL menerapkan pola operasi tunggu dengan menempatkan unsur TNI AL tersebut pada pangkalan terdekat dengan pergerakan unsur berpedoman pada data informasi intelijen guna efektifitas dan efisiensi gelar operasi. Menyikapi hal tersebut, maka perlu perubahan manajemen dan pola dispersi KRI jenis AMY Class oleh Koarmada II, dengan ketersediaan KRI AMY Class sebanyak 6 unit, maka dispersi KRI AMY Class untuk operasi di Perairan Selatan Jawa ditambah menjadi 2 unit dengan asumsi 1 unit lainnya mendukung operasi pengamanan jalur ALKI, 1 unit lainnya mendukung operasi perbatasan RI-Malaysia-Filipina dan 2 unit KRI stand by melakukan rotasi pemeliharaan dan perawatan (Harwat) di Fasharkan jajaran Koarmada II.

Dalam strategi kerjasama stakeholder masih belum berjalan optimal karena masih bersifat sektoral dan belum mampu menjadi kekuatan yang terintegrasi hal ini disebabkan terbatasnya sarana patroli negara yang dimiliki oleh TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut, serta unsur sarana patroli dari Bakamla RI, Satpolair Polresta Cilacap, Stasiun PSDKP Cilacap sebagai komponen pendukung pertahanan di laut, terbatasnya unsur tersebut sehingga berimplikasi pada kekosongan kehadiran unsur pada area wilayah perairan Selatan Jawa, kondisi tersebut juga dihadapkan keterbatasan peralatan surveillance yang dimiliki TNI AL, Satpolair Polresta Cilacap dan Stasiun PSDKP Cilacap, adapun MIC yang dimiliki Bakamla belum didistribusikan terhadap stakeholder maritim secara konsisten. Selain keterbatasan sarana patroli negara dan keterbatasan peralatan surveillance, aspek kerjasama stakeholder maritim di perairan Selatan Jawa juga belum terjalin hal ini dihadapkan pada kendala tumpang tindih peraturan perundangan yang menjadikannya barier dan penyebab ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Menyikapi hal tersebut, perlu langkah strategis dengan mendorong implementasi omnibus law bidang keamanan laut dengan mengintegrasikan stakeholder maritim non TNI AL sebagai unsur komponen pendukung sehingga terwujud kekuatan pengganda TNI AL dalam strategi pertahanan di laut yang selanjutnya diperkuat dengan kerangka kerja (frame work) yang sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Konstitusi Press.
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia untuk Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). Underwater Surveillance Pertahanan Laut Indonesia.
- Fatimah, A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 1(1).
- Godam. (2009). Teori laut. Bumi Aksara.
- Haerulloh, A. A., Suseto, B., & Warka, I. W. (2024). Bandung Dalam Menghadapi Ancaman Dari Selatan Jawa Barat (Studi Kasus Posal Pangandaran) Defense Strategy Of The



Bandung Naval Base (Lanal) In Facing Threats From Southern West Java (Case Study Posal Pangandaran). Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 14, 60–81.

Liddell-Hart, B. H. (1967). Strategy (2nd Edition). Frederick.

Marsetio. (2015). Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh. Universitas Negeri Yogyakarta.

Raharjo, S. (1981). Hukum Masyarakat & Pengembangan. Alumni.

Sukristono. (1995). Perencanaan Strategis Bank. Institut Bankir Indonesia.

Supriyanto, M. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syarifudin, T. (2015). Ilmu Pertahanan; Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi. Salemba Medika.

Tita, J. (2017). Pengetian Deteksi. http://elib.unikom.ac.id/Files/Di%0Ask1/696/Jbptunikompp-GdlTitatjahya-34755-9-Unikom_TI.Pdf

Umar, H. (2001). Strategic Management InAction. PT Gramedia Pustaka Utama.

Wickens, T. . (2002). Elementary Signal Detection Theory. Oxford University Press.